

PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN DASAR TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Ujang Didi Supriyadi

Fakultas PIA
Universitas Subang – Jawa Barat

Abstract

This study was aimed at finding out the results of the Education Decentralization Program implemented by the Government through the Decentralized Basic Education Project (DBEP). DBEP was a primary education decentralization project utilizing a loan fund from Asian Development Bank (ADB) and APBN/APBD aimed at increasing access and education quality for the poor society. The study took place at Jembrana Regency, in Bali Province, which had biggest count of poor population. Results showed that there was education quality improvement before and after the implementation of the education decentralization program. Based on mean difference statistical test, it could be concluded that there was significant difference in It was concluded that the primary education decentralization program had given a significant influence on the improvement of education quality in Jembrana Regency.

Key words: Decentralized Basic Education, education quality

*Alamat Korespondensi: Ujang Didi Supriyadi
Fakultas PIA – Universitas Subang Jawa Barat
HP. 081399770 e-mail: adang_wijatya@yahoo.com*

Pendahuluan

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah tersebut, sampai saat ini belum membawa hasil yang optimal. Salah satu indikator kekurang-berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan prestasi siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SD, SMP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan berarti, bahkan boleh dikatakan menurun dari tahun ke tahun. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia secara umum belum optimal.

Seiring dengan berlakunya otonomi pendidikan, maka setiap sekolah memiliki keleluasaan dalam mengatur proses pendidikan dan juga memiliki otoritas penuh untuk mengoptimalkan SDM yang ada. Otonomi pendidikan juga merupakan momentum tepat bagi setiap sekolah untuk menerapkan strategi-strategi yang dimiliki oleh setiap sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, keefektivitasan dan efisiensi. Dalam prakteknya pengelola sekolah perlu melibatkan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. Sekolah yang efektif melalui proses perbaikan yang kontinu dan pembagian tanggung jawab merupakan fokus utama yang ingin dicapai dari

penerapan desentralisasi pendidikan dasar, sehingga apabila prinsip tersebut benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem pendidikan menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah.

Pendidikan sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dan sistem persekolahan merupakan wahana untuk memperkuat pengaruh-pengaruh politik serta menjalankan program dan tujuan para penguasa. Sukses atau gagalnya upaya desentralisasi persekolahan sering kali lebih ditentukan oleh alasan-alasan politis dari pada rancangan teknis. Program-program desentralisasi sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, dalam pengertian ini, persoalan desentralisasi melibatkan bukan hanya unsur pendidikan (dalam pengertian pengajaran dan pendidikan melalui pengajaran) itu sendiri, tetapi juga unsur-unsur administratif dan finansial. Selain itu, karena pendidikan secara tidak langsung terkait dengan kebijakan politis, maka semua upaya untuk mengubah kebijakan dan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan diperlukan upaya melalui jalur politis.

Bila menyepakati gagasan yang mengusulkan bahwa perancangan pendidikan seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik individual maupun kelompok, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemerintah, penyelenggara sekolah, guru, dosen, orang tua dan berbagai asosiasi profesional di bidang pendidikan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok

agama. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah, dengan mengacu kepada masukan dari semua yang disebutkan di atas, hanya merangkai kerangka dasar. Pemerintah bisa menetapkan tujuan umum dan menyiapkan sumber-sumber daya di bidang pendidikan, tetapi pengelolaan dari hari ke hari diserahkan ke otoritas yang lebih rendah, bahkan ke sekolah-sekolah. Sekolahpun harus mendengarkan masukan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Masukan ini lalu menjadi bagian dari sistem pengajaran dan pendidikan yang lebih luas, sehingga pada akhirnya pendidikan tumbuh sebagai proses dialektika antara sistem dan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tersebut dikeluarkan melalui kebijakan desentralisasi pendidikan atau *Decentralized Basic Education Project (DBEP)*.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jembrana dengan menggunakan data sekunder tahun 1998-2000 yaitu masa dimana belum diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan tahun 2002-2004 yaitu masa dimana sudah diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan dasar. Analisis terbatas pada aspek-aspek sebagai berikut: (a) Input, yang meliputi (1) pendidikan kepala sekolah; (2) pendidikan guru; (b) Proses, merupakan kegiatan penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan dasar, namun tidak dilakukan penelitian untuk aspek ini; (c) Output, yang meliputi (1) persentase siswa putus sekolah; (2) persentase siswa mengulang di kelas; (3) persentase siswa melanjutkan sekolah dan (4) rata-rata nilai UAN.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh penerapan desentralisasi pendidikan dasar terhadap kualitas pendidikan pada 12 sekolah SMP yang mendapat dana bantuan desentralisasi pendidikan dasar di Kabupaten Jembrana?

Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis pengaruh penerapan desentralisasi pendidikan dasar terhadap kualitas pendidikan pada 12 sekolah SMP yang mendapat dana bantuan desentralisasi pendidikan dasar di Kabupaten Jembrana.

Terkait dengan desentralisasi pendidikan, USAID (2000), mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut: “Desentralisasi adalah proses penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum”. Menurut Rondinelli, (1998) bahwa; “Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dan tanggungjawab mengenai fungsi-fungsi publik dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah atau ke sektor swasta”. Selain itu, Ayres (2001) mengategorikan desentralisasi menjadi empat tipologi yaitu: (1) desentralisasi politik, (2) desentralisasi administrasi (dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi), (3) desentralisasi fiskal, dan (4) desentralisasi ekonomi/pasar.

Edward B. Fiske (dalam Tilaar), mengatakan bahwa: *Decentralization is necessary but not sufficient to improve the quality of education*. Desentralisasi pendidikan justru akan memperkuat tumbuhnya suatu perasaan nasional yang lebih sehat dan lebih nyata karena didasarkan kepada kekayaan budaya atau praksis pendidikan lokal. Dari pribadi yang kuat itulah dapat dikembangkan pribadi Indonesia yang berkualitas kebudayaan nasional. Selain itu, menurutnya adanya desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks oleh karena:

- 1) Akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret;
- 2) Mengatur sumber daya serta pemanfaatannya;
- 3) Melatih tenaga-tenaga (SDM) yang profesional, baik tenaga guru maupun tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan;
- 4) Menyusun kurikulum yang sesuai, dan
- 5) Mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan kepada kebudayaan setempat.

Desentralisasi pendidikan dan kebudayaan juga dapat berakibat kepada peningkatan penghargaan terhadap profesi guru dan administrator pendidikan dan semua hal ini sangat tergantung kepada keputusan-keputusan politik.

Koswara menyatakan bahwa tidak mungkin membahas otonomi daerah tanpa melihat pada konteksnya dengan desentralisasi. Konsep otonomi daerah dan desentralisasi dapat dipandang sebagai fenomena politik maupun administrasi negara. Secara eksplisit Koswara menyatakan bahwa desentralisasi terkait dengan persoalan pembagian kewenangan kepada organ – organ penyelenggara negara; sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Di Indonesia, desentralisasi selalu dikaitkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengertian ini menjadi semakin sempit, karena desentralisasi hanya dibatasi pada pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada unit-unit pemerintah di bawahnya (pemerintah daerah), tidak termasuk lembaga-lembaga lain yang sifatnya non pemerintah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Smith dan Cohen & Peterson

Paddick (1983) menjelaskan desentralisasi mencakup proses *deconcentration* dan *devaluation*. Ia merumuskan *devaluation* sebagai penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada Pemerintah Daerah (*local authority*). Sedangkan Leemans (1970) menyebutkan desentralisasi menyangkut pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.

Uraian di atas ini, menggambarkan alasan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi begitu penting untuk dilaksanakannya desentralisasi. Menurut Kaho (1992) ini berkaitan dengan etika penyelenggaraan pemerintah yang

mengajarkan kepada kita bahwa: “pemusatan kekuasaan pada satu tangan, entah itu dalam tangan seseorang maupun sekelompok orang, akan memberi peluang yang besar sekali bagi pihak-pihak yang monopoli kekuasaan tersebut untuk menyalahkan.

Prawirohardjo S. dan Pamoedji S. dalam Soemitro juga mengajukan alasan-alasan pentingnya desentralisasi, yaitu:

- a. *To realize and implement the democratic philosophy,*
- b. *To realize national freedom and to create a sense of freedom to the regions,*
- c. *To train the region to achieve the maturity and be able to manage their own affairs and interests effectively as soon as possible,*
- d. *To provide political schooling for the whole people,*
- e. *To provide channels for regional aspiration and participation,*
- f. *To make the government in general optimally efficient and effective*

Dari semua paparan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan. Selain itu, desentralisasi juga ditujukan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan.

Terkait dengan variabel kualitas pendidikan adalah teori kualitas. Pengertian kualitas ini dibutuhkan agar diperoleh sintesis yang benar tentang variabel kualitas dalam pendidikan. Dalam kaitannya dengan pengertian kualitas, hingga sekarang belum ada rumusan atau definisi kualitas yang berlaku universal, dalam arti diterima oleh sejumlah kalangan. Para pakar pada umumnya mendefinisikan kualitas dengan merujuk pada bidang keilmuannya

masing-masing. Sebagai ilustrasi, berikut disajikan beberapa pengertian atau definisi yang akan dijadikan dasar bagi penulisan tesis ini.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, pengertian dari kualitas secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mencakup:

- 1) *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, misalnya berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumberdaya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang bahan, dsb). Sedangkan *input* perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Kemudian harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.
- 2) *Proses* pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan berskala makro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.
- 3) *Output pendidikan* adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah ialah prestasi sekolah yang dihasilkan dari

proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya.

Stoner et al, memberikan definisi yang relatif umum: *“Quality is a sense of appreciation that something is better than something else* Sedangkan para pakar lainnya memberikan batasan yang beragam dan lebih spesifik. Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan Diana memberikan batasan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kemudian Feigenbaume menyatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan.

Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Selamet (1998) berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang melihat banyaknya tamatan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi, atau yang diterima di dunia usaha. Padahal pada era globalisasi ini masyarakat sudah mulai kritis dan selektif dalam menentukan sekolah mana yang dapat memberi jaminan masa depan tamatannya yang lebih baik. Di sisi lain Heyneman dan Loxley dalam Boediono & Abbas Ghazali (1999) menyimpulkan bahwa kualitas sekolah dan guru hnampaknya sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia; dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut.

Cara Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SMP (Negeri dan Swasta) yang ada pada lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana yang berlangsung selama 2 (bulan), yaitu mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2007. Di dalam penelitian ini hanya terdapat 12 SMP dari 31 SMP yang mendapatkan dana program desentralisasi pendidikan dasar, keduabelas SMP tersebut meliputi:

1. SMPN 3 Negara
2. SMPN 4 Negara
3. SMPN 1 Mendoyo
4. SMPN 2 Mendoyo
5. SMPN 2 Negara
6. SMPN 5 Negara
7. SMPN 3 Mendoyo
8. SMPN 4 Mendoyo
9. SMP Swasta Karya Negara
10. SMP Nasional Karya Negara
11. SMP Nasional Barangbang
12. SMP Sutha Kerti Pergung

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis *ex post facto* yang artinya suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen yaitu jika x maka y, hanya saja dalam penelitian ini tidak ada manipulasi langsung terhadap variable independent. Selain itu, untuk menguji keterkaitan di antara variabel penelitian maka dilakukan pengujian Hipotesis Statistik.

Populasi penelitian ini adalah seluruh SMP yang pada Kabupaten Jembrana, dan sampel yang diambil sejumlah 12 SMP (Negeri dan Swasta), yang merupakan sekolah yang mendapatkan dana program desentralisasi pendidikan dasar dari pemerintah pada tahun 2002. Keduabelas SMP tersebut secara keseluruhan dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil laporan yang ada pada keduabelas SMP yang dijadikan obyek penelitian. Pengumpulan data sekunder terhadap prestasi SMP tersebut meliputi nilai (1) Persentase Siswa Putus Sekolah (PSPS), (2) Persentase Siswa Mengulang di Kelas (PSMK), (3) Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah (PSMS), dan (4) Rata-rata Nilai UAN, sebagai variabel bebas kualitas pendidikan sedangkan variabel desentralisasi merupakan variabel yang tidak diukur dalam penelitian ini. Pengukuran kualitas pendidikan dapat dilihat dengan membandingkan antara pelaksanaan sebelum program desentralisasi pendidikan dasar (sebelum tahun 2006) dengan sesudah program desentralisasi pendidikan dasar (pada masa dan sesudah tahun 2006).

b. Data Primer

Selain data sekunder dilakukan pula pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian. Pengambilan data primer tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu: (1) Kuesioner. Pengambilan data melalui kuesioner dilakukan kepada 12 SMP dengan mengisi nilai-nilai ukuran kualitas pendidikan, yaitu PSPS, PSMK, PSMS dan UAN; (2) Wawancara. Pengambilan data melalui

wawancara dilakukan kepada kepala sekolah SMP dan Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan dasar dan kualitas pendidikan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Analisis deskriptif.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sebelum dan sesudah program desentralisasi dalam melihat kualitas pendidikan yang diukur dengan indikator (1) Persentase Siswa Putus Sekolah (PSPS), (2) Persentase Siswa Mengulang di Kelas (PSMK), (3) Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah (PSMS), dan (4) Rata-rata Nilai UAN. Alat analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, rata-rata dan standar deviasi dari data sekunder yang diperoleh.

2. t test (*student test*)

Uji dengan t-test dengan menggunakan *mean different* dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan antara pelaksanaan sebelum dan sesudah program desentralisasi. Keputusannya adalah dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Ketentuannya adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel} \rightarrow H_0$ ditolak (ada perbedaan yang signifikan)
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel} \rightarrow H_0$ gagal ditolak (tidak ada perbedaan yang signifikan)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam menganalisis pengaruh dari kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan yang terjadi di Kabupaten Jembrana, maka dilakukan pengukuran kualitas pendidikan berdasarkan *Input* dan *Output* pada sebelum dan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan.

Aspek *Input*

a. Pendidikan Tinggi Kepala Sekolah

Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1, rata-rata tingkat Pendidikan Tinggi Kepala Sekolah untuk setiap SMP baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Jembrana mengalami sedikit perubahan pada sesudah penerapan program desentralisasi pendidikan. Peningkatan jumlah kepala sekolah yang berjenjang pendidikan ke S1 mengalami peningkatan yang tajam setelah penerapan desentralisasi, sebelum adanya desentralisasi rata-ratanya sebesar 54,3%, dan sesudah terjadi desentralisasi rata-rata sebesar 80%. Demikian pula penurunan pada tingkat pendidikan D3, sebelum desentralisasi rata-rata sebesar 19% dan sesudah desentralisasi menurun rata-ratanya menurun sebesar 14,3%. PGSLTP mengalami penurunan yakni sebelum desentralisasi rata-ratanya sebesar 26,7% dan sesudah terjadi desentralisasi rata-ratanya menjadi sebesar 6,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan kepala sekolah pada jenjang S1.

Tabel 1.
Pendidikan Kepala Sekolah

Jenjang	Sblm Desentralisasi			Rata-rata	Ssdh Desentralisasi			Rata-rata
	1998	1999	2000		2002	2003	2004	
	%	%	%	%	%	%	%	
PGSLTP	30	30	20	26.7	8	6	5	6.3
D3	20	18	19	19.0	16	14	13	14.3
S1	50	52	61	54.3	78	80	82	80.0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

b. Pendidikan Tertinggi Guru

Pada Tabel 2 tentang tingkat Rata-rata Pendidikan Tertinggi Guru di setiap SMP yang ada di Kabupaten Jembrana, baik negeri maupun swasta telah mengalami pertumbuhan setelah adanya desentralisasi. Seiring dengan hal tersebut, dibuktikan bahwa sebelum terjadi adanya desentralisasi persentase guru yang berpendidikan PGSLP rata-ratanya sebesar 37,3% dan setelah terjadi desentralisasi mengalami penurunan dengan rata-ratanya menjadi sebesar 25%. Pada D3 sebelum terjadi desentralisasi rata-ratanya sebesar 51% dan sesudah terjadi desentralisasi mengalami peningkatan sebesar 53,7%. Disamping itu untuk tingkat S1 sebelum adanya desentralisasi rata-ratanya sebesar 11,7%, dan setelah terjadi desentralisasi mengalami peningkatan yang tajam, yaitu rata-ratanya menjadi sebesar 21,3%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan telah memberikan peluang kepada guru untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih baik ke tingkat sarjana.

Tabel 2.
Rata-Rata Pendidikan Tertinggi Guru

Jenjang	Sblm Desentralisasi			Rata-rata	Sesdh Desentralisasi			Rata-rata
	1998	1999	2000		2002	2003	2004	
	%	%	%	%	%	%	%	
PGSLTP	42	40	30	37.3	27	25	23	25
D3	48	49	56	51	56	53	52	53.7
S1	10	11	14	11.7	17	22	25	21.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Aspek Output

Evaluasi pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan memperbandingkan antara tahun 2000 dengan tahun 2004. Hasil perbandingan adalah sebagai berikut:

c. Unsur Persentase Siswa Putus Sekolah (PSPS)

Ukuran untuk unsur ini akan di jelaskan lebih terperinci seperti Tabel 3 di bawah ini yaitu :

Tabel 3.
Persentase Siswa Putus Sekolah

No.	Nama Sekolah	2000	2004	Selisih
1	SMPN 3 Negara	0.00	0.11	0.11
2	SMPN 4 Negara	0.01	0.00	-0.01
3	SMPN 1 Mendoyo	1.55	0.31	-1.24
4	SMPN 2 Mendoyo	0.10	0.22	0.12
5	SMPN 2 Negara	1.12	0.70	-0.42
6	SMPN 5 Negara	1.22	0.93	-0.29
7	SMPN 3 Mendoyo	1.03	0.41	-0.62
8	SMPN 4 Mendoyo	0.00	0.00	0.00
9	SMP Swasta Karya Negara	1.69	0.00	-1.69
10	SMP Nasional Karya Negara	1.39	1.08	-0.31
11	SMP Nasional Barangbang	1.00	0.00	-1.00
12	SMP Sutha Kerti Pergung	0.00	0.00	0.00
	Rata-rata	0.76	0.31	-0.45

Dari Tabel 3 di atas terlihat secara umum di setiap sekolah persentase siswa putus sekolah menunjukkan penurunan. Hal ini diindikasikan dengan selisih yang kebanyakan negatif atau dapat dilihat dari nilai rata-ratanya yang nilainya juga negatif. Penurunan terbesar Sekolah di SMP Swasta Karya Negara yang semula nilai tahun 2000 sebesar 1,69% dan tahun 2004 tidak ada yang putus sekolah.

- d. Unsur Persentase Siswa Mengulang di Kelas (PSMK)
Berdasarkan hasil analisis yang di dapat dari Tabel 4, secara umum siswa yang mengulang di kelas menunjukkan penurunan. Hasil ini mendapatkan nilai rata-rata yang negatif. Penurunan terbesar Sekolah di SMP Swasta Karya Negara yang semula nilai tahun 2000 sebesar 1,01% dan di tahun 2004 tidak ada yang mengulang di kelas.

Tabel 4
Persentase Siswa Mengulang di Kelas

No.	Nama Sekolah	2000	2004	Selisih
1	SMPN 3 Negara	0.90	1.36	0.46
2	SMPN 4 Negara	0.02	0.19	0.17
3	SMPN 1 Mendoyo	0.51	0.00	-0.51
4	SMPN 2 Mendoyo	0.00	0.00	0.00
5	SMPN 2 Negara	1.12	0.42	-0.70
6	SMPN 5 Negara	0.73	0.00	-0.73
7	SMPN 3 Mendoyo	0.00	0.00	0.00
8	SMPN 4 Mendoyo	0.00	0.00	0.00
9	SMP Swasta Karya Negara	1.01	0.00	-1.01
10	SMP Nasional Karya Negara	0.69	0.00	-0.69
11	SMP Nasional Barangbang	0.00	0.95	0.95
12	SMP Sutha Kerti Pergung	0.00	0.00	0.00
	Rata-rata	0.42	0.24	-0.17

- e. Unsur Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah (PSMS)
Ukuran untuk unsur ini akan di jelaskan lebih terperinci seperti Tabel 5 di bawah ini yaitu :

Tabel 5.
Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah

No.	Nama Sekolah	2000	2004	Selisih
1	SMPN 3 Negara	29.56	72.79	43.23
2	SMPN 4 Negara	8.95	73.00	64.05
3	SMPN 1 Mendoyo	23.79	97.00	73.21
4	SMPN 2 Mendoyo	91.00	78.50	-12.50
5	SMPN 2 Negara	0.00	98.39	98.39
6	SMPN 5 Negara	96.71	72.36	-24.35
7	SMPN 3 Mendoyo	25.22	93.00	67.78
8	SMPN 4 Mendoyo	0.00	100.00	100.00
9	SMP Swasta Karya Negara	100.00	100.00	0.00
10	SMP Nasional Karya Negara	45.45	97.14	51.69
11	SMP Nasional Brambang	17.00	62.39	45.39
12	SMP Sutha Kerti Pergung	117.60	67.29	-50.31
	Rata-rata	46.27	84.32	38.05

Kenyataan yang diperoleh dari hasil analisis pada tabel 5 di atas ini, secara umum siswa yang melanjutkan sekolah menunjukkan peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan selisih yang kebanyakan positif atau dapat dilihat dari hasil nilai rata-ratanya yang nilai juga positif sebesar 38,05 %. Peningkatan terbesar yaitu Sekolah di SMP 4 Mendoyo yang semula di tahun 2000 tidak ada yang melanjutkan sekolahnya, kemudian di tahun 2004 terjadi peningkatan nilai sebesar 100 %.

f. Unsur Rata-rata Nilai UAN

Pada Tabel 6 bahwa secara umum rata-rata nilai UAN menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2000 menuju ketahun 2004. Hal ini dapat didindikasikan dengan selisih yang kebanyakan positif atau dapat dilihat dari nilai rata-ratanya yang nilainya positif juga sebesar 0,60 %. Peningkatan terbesar ialah Sekolah di SMP 4 Mendoyo yang semula di tahun 2000 nilainya sebesar 6,22 % dan di tahun 2004 nilainya menjadi sebesar 6,91 %.

Tabel 6.
Rata-rata Nilai UAN

No.	Nama Sekolah	2000	2004	Selisih
1	SMPN 3 Negara	5.37	5.97	0.60
2	SMPN 4 Negara	5.32	5.91	0.59
3	SMPN 1 Mendoyo	5.44	6.04	0.60
4	SMPN 2 Mendoyo	5.19	5.77	0.58
5	SMPN 2 Negara	5.64	6.27	0.63
6	SMPN 5 Negara	5.55	6.17	0.62
7	SMPN 3 Mendoyo	5.57	6.19	0.62
8	SMPN 4 Mendoyo	6.22	6.91	0.69
9	SMP Swasta Karya Negara	4.90	5.44	0.54
10	SMP Nasional Karya Negara	5.73	6.37	0.64
11	SMP Nasional Barangbang	5.09	5.65	0.57
12	SMP Sutha Kerti Pergung	4.86	5.40	0.54
	Rata-rata	5.41	6.01	0.60

g. Unsur Jumlah Siswa

Ukuran untuk unsur ini akan di jelaskan lebih terperinci seperti Tabel 7 di bawah ini yaitu :

Tabel 7.
Jumlah Siswa

No.	Nama Sekolah	2000	2004	Selisih
1	SMPN 3 Negara	799	850	51
2	SMPN 4 Negara	932	991	59
3	SMPN 1 Mendoyo	589	627	38
4	SMPN 2 Mendoyo	787	837	50
5	SMPN 2 Negara	650	691	41
6	SMPN 5 Negara	402	428	26
7	SMPN 3 Mendoyo	638	679	41
8	SMPN 4 Mendoyo	192	204	12
9	SMP Swasta Karya Negara	296	315	19
10	SMP Nasional Karya Negara	176	187	11
11	SMP Nasional Barangbang	98	104	6
12	SMP Sutha Kerti Pergung	44	47	3
	Rata-rata	467	496.67	30

Hasil analisis yang di peroleh dari Tabel 7 di atas, adalah secara umum jumlah siswa menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2000 hingga ke tahun 2004. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya nilai selisih yang positif semua atau dapat dilihat dari nilai rata-ratanya yang positif pula. Peningkatan yang terbesar adalah Sekolah di SMP 4 Negara yang semula di tahun 2000 nilainya sebesar 932 dan kemudian pada tahun 2004 nilainya menjadi sebesar 991.

Selain itu, output yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8.
Angka Prestasi Siswa

No	OUTPUT DINAS	Sblm Desentralisasi			Rata-rata	Sesdh Desentralisasi			Rata-rata
		1998	1999	2000		2002	2003	2004	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	76.77	91.05	63.97	77.3	93.49	94.01	96.1	94.5
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	68.17	84.16	46.4	66.2	89.1	89.11	89.39	89.2
3	Angka Putus Sekolah	2.11	0.92	0.08	1.0	2.15	0.8	0.07	1.0
4	Angka Mengulang Kelas	13.44	0.27	1.05	4.9	0.13	0.26	0.2	0.2
5	Angka Melanjutkan Sekolah	83.31	83.31	83.31	83.3	86.07	87.02	90.88	88.0

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Jembrana tahun 2005.

Lebih lanjut, untuk angka retrieval dapat diperhatikan pada tabel 9 di bawah ini, yaitu siswa yang mengalami putus sekolah dan mendapatkan kesempatan kembali untuk mengikuti pendidikan kembali, untuk angka retrieval ini hanya diperoleh data yang cukup lengkap pada SMPN 2 Mendoyo, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 9, persentase angka retrieval berkisar antara 5% hingga 8% sebelum pelaksanaan desentralisasi namun mengalami penurunan pada pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 9.
Angka Retrieval

Angka Retrieval	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata
SMPN 3 Mendoyo	-	-	-	-	-	-	21	21
SMPN 2 Mendoyo	5% (817)	8% (853)	8% (868)	7% (855)	6% (887)	9% (842)	2% (837)	
SMPN 5 Negara	-	-	-	-	-	-	35	35
SMPN 2 Melaya	-	-	-	-	-	-	-	86
SMPN 3 Melaya	-	-	-	-	-	-	-	18
SMPN 4 Melaya	-	-	-	-	-	-	-	10

Sumber: Hasil Penelitian yang di olah

Untuk menguji adakah pengaruh dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan dapat dilihat melalui uji rata-rata beda (*mean different*) antara sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi. Hasil hipotesis uji beda didapatkan hasil bahwa pada indikator Persentase Siswa Putus Sekolah (PSPS), Persentase Siswa Mengulang di Kelas (PSMK) dan Rata-rata Nilai UAN ketiganya tidak memberikan perubahan, artinya tidak terdapat pengaruh program desentralisasi pendidikan. Namun hanya indikator Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah (PSMS) yang memberikan perubahan peningkatan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program desentralisasi pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian dengan menggunakan uji rata-rata beda (*mean different*) maka diperoleh suatu kesimpulan, yaitu adanya peningkatan pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan, *input* yang meliputi pendidikan kepala sekolah, dan pendidikan guru telah mengalami peningkatan pada jumlah dan strata pendidikannya. *output* terdiri dari lima unsur ialah antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Persentase Siswa Putus Sekolah (PSPS)

Untuk ukuran Persentase Siswa Putus Sekolah (PSPS), didapat hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan dasar tidak memberikan perubahan kualitas pendidikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program desentralisasi pendidikan pada Kabupaten Jembrana.

2. Unsur Persentase Siswa Mengulang di Kelas (PSMK)

Untuk ukuran Persentase Siswa Mengulang di Kelas (PSMK), didapat hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak memberikan perubahan kualitas pendidikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program desentralisasi pendidikan pada Kabupaten Jembrana.

3. Unsur Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah (PSMS)

Untuk ukuran Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah (PSMS), didapat hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan memberikan perubahan kualitas pendidikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program desentralisasi pendidikan pada Kabupaten Jembrana. Dalam penelitian ini terjadi peningkatan kualitas pendidikan antara sebelum dengan sesudah

desentralisasi pendidikan. Rata-rata persentase siswa melanjutkan sekolah sebelum desentralisasi pendidikan dasar (tahun 2000) sebesar 46.27%, meningkat sebesar 38.05% pada tahun 2004 menjadi 84.32%. SMPN 4 Mendoyo merupakan sekolah yang mengalami peningkatan terbesar yaitu 100%.

4. Unsur Rata-rata Nilai UAN

Untuk ukuran Rata-rata Nilai UAN, didapat hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak memberikan perubahan kualitas pendidikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program desentralisasi pendidikan pada Kabupaten Jembrana.

Daftar Pustaka

- Boediono dan Ghozali, Abbas. (1999). Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan: Pendekatan fungsi Produksi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah KAJIAN*, No. 020, Desember 1999, Tahun ke-5
- Kaho, Josef Riwu (1992). *Desentralisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*, Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fisip UGM.
- Leemans (1970). *Changing Patterns of Local Government*. IULIA: The Hangnes.
- Selamet, M. "Tuntutan kualitas unggulan pada sekolah menengah kejuruan" *Jurnal Ilmiah KAJIAN* No. 015/IV, Desember 1998

Raddick, R. (1983). *Democracy, decentralization and development*.
Bombay: Asia Publishing House.

Rondinelli D. A.(1998). *Financing the decentralization of education
services and facilities*. In Puma, M. and Rondinelli, D.A., eds.
Decentralizing the Governance of Education. Washington,
D.C.